

**PENGARUH DANA PERIMBANGAN DAN PENDAPATAN
ASLI DAERAH TERHADAP BELANJA MODAL PADA
KABUPATEN DAN KOTA DI PROVINSI BANTEN**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Dalam Mencapai Gelar
Sarjana Ekonomi (S-1) Jurusan Ilmu Ekonomi Pembangunan Fakultas
Ekonomi dan Bisnis Universitas Sultan Ageng Tirtayasa



Oleh :

BAHJATUN NADZILAH YAHSIA

5553190072

**KONSENTRASI EKONOMI PUBLIK
JURUSAN ILMU EKONOMI PEMBANGUNAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA**

2024

SKRIPSI

**PENGARUH DANA PERIMBANGAN DAN PENDAPATAN
ASLI DAERAH TERHADAP BELANJA MODAL PADA
KABUPATEN DAN KOTA DI PROVINSI BANTEN**

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Dalam Mencapai Gelar
Sarjana Ekonomi (S-1) Jurusan Ilmu Ekonomi Pembangunan Fakultas
Ekonomi dan Bisnis Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

Oleh :

BAHJATUN NADZILAH YAHSÄ

5553190072

**KONSENTRASI EKONOMI PUBLIK
JURUSAN ILMU EKONOMI PEMBANGUNAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA**

2024

**PERSETUJUAN PENGESAHAN
PEMBIMBING DAN DEWAN PENGUJI**

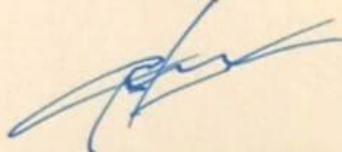
Skripsi dengan judul:

**PENGARUH DANA PERIMBANGAN DAN PENDAPATAN ASLI DAERAH
TERHADAP BELANJA MODAL PADA KABUPATEN DAN KOTA DI
PROVINSI BANTEN**

Telah diuji dalam sidang skripsi yang diselenggarakan oleh Jurusan Ilmu Ekonomi Pembangunan
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sultan Ageng Tirtayasa dan dinyatakan **LULUS**
Pada hari Kamis, 1 Februari 2024 oleh Dewan Penguji.

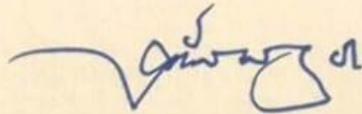
Serang, 2 Februari 2024

Pembimbing I



Sayifullah, S.E., M.Akt
NIP. 198204222008121003

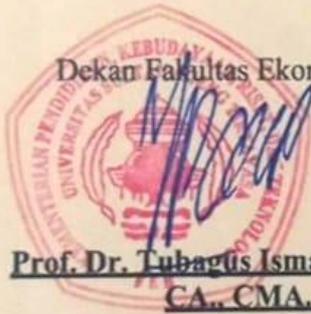
Pembimbing II



Rah Adi Fahmi Ginanjar, S.E., M.T
NIP. 198801052024211019

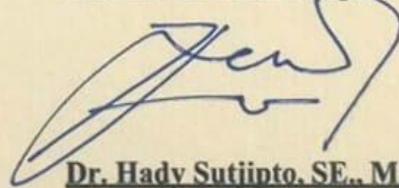
Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis



Prof. Dr. Tubagus Ismail, SE.Ak., M.M.,
CA., CMA., CPA
NIP. 197312302001121001

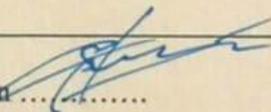
Ketua Jurusan
Ilmu Ekonomi Pembangunan



Dr. Hady Sutjipto, SE., M.Si
NIP. 197011052008121002

Dewan Penguji

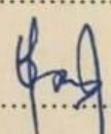
Sayifullah, S.E., M.Akt
NIP. 198204222008121003

Tanggal 9/2/24 Tanda Tangan 

Umayatu Suiroh Suharto., S.E., M.Si
NIP. 197309242006042010

Tanggal 31/2/24 Tanda Tangan 

Vadilla Mutia Zahara, S.E., M.E
NIP. 199106272019032023

Tanggal 8/06/24 Tanda Tangan 

Nama : Bahjatun Nadzilah Yahsa
NIM : 5553190072
Jurusan : Ilmu Ekonomi Pembangunan
Jenjang Pendidikan : Strata-1 (S1)

LEMBAR PERNYATAAN

Bahjatun Nadzilah Yahsa, 5553190072, Jurusan Ilmu Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Skripsi dengan judul :

“Pengaruh Dana Perimbangan dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Modal Pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Banten”

Saya tulis sebagai sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E) dari Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, seluruhnya merupakan hasil karya saya sendiri.

Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan skripsi yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai norma, kaidah, dan etika penulisan karya ilmiah.

Apabila dikemudian hari ditemukan seluruh atau sebagian skripsi ini bukan hasil karya saya sendiri atau adanya plagiat dalam bagian tertentu, saya bersedia menerima sanksi berupa pencabutan gelar akademik yang saya sandang dan sanksi-sanksi lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Serang, 2 Februari 2024



Bahjatun Nadzilah Yahsa

MOTO DAN PERSEMBAHAN

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya.”

(QS. Al-Baqarah, 2:286)

*“Semua ada waktunya. Jangan membandingkan hidupmu dengan orang lain.
Tidak ada perbandingan antara matahari dan bulan, mereka bersinar saat
waktunya tiba” - B.J. Habibie*

Persembahan

*Karya ini saya persembahkan untuk diri saya sendiri yang sudah berusaha
semaksimal mungkin dan tidak menyerah dengan keadaan. Serta saya
persembahkan untuk kedua orang tua & kakak-kakak saya yang sudah memberi
dukungan secara moril dan materil serta mendoakan dengan tulusnya tanpa
henti.*

ABSTRACT

In this era of fiscal decentralization, there is increasing demand from the public for public services in their regions to be further improved. To procure assets for a region, the Regional Government carries out capital expenditure as an investment to finance the implementation of regional autonomy which aims to improve the welfare of development infrastructure and facilities and infrastructure of a region. This research aims to analyze the influence of Balancing Funds Locally-Generated Revenue on Capital Expenditures in Regencies and Cities in Banten Province. The Balancing Fund variables taken are DAU, DAK, and DBH. The data used in this research is secondary data obtained from publications by the Central Statistics Agency for the period 2017 to 2021. The analytical method used in this research is the Panel Data approach with the OLS (Ordinary Least Square). The results of this research prove that there is a significant influence on the DBH and PAD variables on capital expenditure, but the DAU and DAK variables have no effect on capital expenditure in Banten Province from 2017 to 2022.

Keywords : Capital Expenditure, Balancing Fund, Data Panel, Locally-Generated Revenue (PAD)

ABSTRAK

Masa era desentralisasi fiskal ini, semakin banyak permintaan masyarakat akan pelayanan publik di daerahnya untuk lebih ditingkatkan lagi. Untuk pengadaan aset suatu daerah, Pemerintah Daerah melakukan belanja modal sebagai investasi untuk membiayai pelaksanaan otonomi daerah yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan infrastruktur pembangunan serta sarana dan prasarana suatu daerah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana pengaruh Dana Perimbangan dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Modal pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Banten. Variabel Dana Perimbangan yang diambil yaitu DAU, DAK, dan DBH. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari publikasi Badan Pusat Statistik periode tahun 2017 sampai dengan 2021. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Data Panel dengan model OLS (*Ordinary Least Square*). Hasil dari penelitian ini membuktikan terdapat pengaruh signifikan pada variabel DBH dan PAD terhadap Belanja Modal, namun variabel DAU dan DAK tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal di Provinsi Banten tahun 2017 sampai 2022.

Kata Kunci : Belanja Modal, Dana Perimbangan, Panel Data, Pendapatan Asli Daerah (PAD)

KATA PENGANTAR

Dengan menyebut nama Allah SWT yang maha Pengasih dan maha Penyanyang. Puji dan syukur Alhamdulillah dengan kehadiratnya, yang telah memberikan karunia, rahmat dan hidayahnya, skripsi ini dapat diselesaikan dengan tepat waktu. Dibuatnya skripsi ini untuk menjadi salah satu syarat yang harus dipenuhi untuk mendapatkan gelar Sarjana Ekonomi di jurusan Ilmu Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Penulis dapat menyelesaikan penelitian yang berjudul “Pengaruh Dana Perimbangan dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Modal pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Banten” penulis berharap dapat memberikan sedikit pengetahuan untuk semua masyarakat dan juga peneliti sendiri.

Penulis menyadari bahwa masih ada banyak kekurangan baik dari segi penulisan ataupun yang lainnya. Penulis berharap saran dan kritik dari pembaca sangat diharapkan untuk perbaikan dan penyusunan penelitian ini. Penulisan dan penyusunan ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak yang telah membantu dan mendoakan dalam penyusunan penelitian ini. Dan tak lupa penulis menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada

1. Bapak Prof. Dr. Ir. H. Fatah Sulaiman, S.T., M.T selaku Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
2. Bapak Prof. Dr. Tubagus Ismail, SE.Ak., MM., CA., CMA., CPA., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.

3. Bapak Dr. Hady Sutjipto, S.E., M.Si., selaku Ketua Jurusan Ilmu Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
4. Bapak Saharuddin Didu, S. TP., M.E, selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
5. Bapak Tony S. Chendrawan, S.T., S.E., M.Si., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang sudah membimbing dari awal perkuliahan semester sampai sekarang.
6. Bapak Sayifullah, S.E., M.Akt., selaku Dosen Pembimbing pertama yang sudah berkenan meluangkan waktu, pikiran, dan tenaga untuk memberikan bimbingan, motivasi, masukan dan arahan kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.
7. Bapak Rah Adi F Ginanjar, S.E., M.T., selaku Dosen Pembimbing kedua yang sudah berkenan meluangkan waktu, pikiran, dan tenaga untuk memberikan bimbingan, motivasi, masukan dan arahan kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.
8. Segenap Dosen Pengajar Jurusan Ilmu Ekonomi Pembangunan yang telah mengajarkan ilmu dan pengetahuan kepada penulis dan para staf Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
9. Kedua orang tua, kakak-kakak, dan keluarga terdekat saya yang telah memberikan dukungan beserta doa tulusnya untuk penulis sehingga dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini.

10. Teman-teman masa perkuliahan, Rifa, Nyimas, Suci, Wulan, Rina, Asti, Jean dan teman-teman kelas C yang telah menemani penulis dari awal masa perkuliahan sampai penyusunan skripsi ini selesai. Terimakasih sudah memberi semangat dan doa serta tukar pikiran selama proses perkuliahan dan skripsi ini.
11. Teman-teman seperjuangan konsentrasi Ekonomi Publik, Dika, Sindi, Fariz, Bagas yang telah menemani dan membantu penulis selama proses pengerjaan skripsi ini.
12. Orang-orang terdekat di luar perkuliahan, Intan, Putri, Ka Depi, Ka Okta, Ka Tuti, Teh Dhea, Teh Wawah, Rena, dan Aryo yang sudah selalu menemani dan memberikan dukungan beserta doa tulusnya untuk penulis sehingga dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini.
13. Dan yang paling utama, diri saya sendiri yang sudah berjuang untuk menyelesaikan skripsi ini dengan baik walaupun tidak sempurna namun berhasil melewatkannya dengan berbagai cobaan internal maupun eksternal.

Serang, Januari 2024

Bahjatun Nadzilah Yahsa

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN	i
MOTO DAN PERSEMBAHAN.....	iii
<i>ABSTRACT</i>	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1. 1 Latar Belakang	1
1. 2 Rumusan Masalah	12
1. 3 Tujuan Penelitian	13
1. 4 Manfaat Penelitian	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	15
2. 1 Kajian Teoritis	15
2. 2 Kajian Empiris	33
2. 3 Kerangka Pemikiran	37
2. 4 Hubungan antar variabel bebas dan variabel terikat	40
2.4.1. Hubungan Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal	40
2.4.2. Hubungan Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Modal	41
2.4.3. Hubungan Dana Bagi Hasil terhadap Belanja Modal	42
2.4.4. Hubungan Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Modal	42
2. 5 Hipotesis Penelitian	44
BAB III METODE PENELITIAN.....	45
3. 1 Ruang Lingkup Penelitian	45
3. 2 Jenis dan Sumber Data	45
3. 3 Metode Pengumpulan Data	46

3.4	Operasionalisasi Variabel.....	46
3.5	Model Penelitian dan Teknis Analisis.....	49
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN		62
4.1	Gambaran Umum	62
4.1.1.	Perkembangan Belanja Modal	62
4.1.2.	Perkembangan Dana Alokasi Umum.....	64
4.1.3.	Perkembangan Dana Alokasi Khusus.....	66
4.1.4.	Perkembangan Dana Bagi Hasil.....	67
4.1.5.	Perkembangan Pendapatan Asli Daerah.....	68
4.2	Hasil Analisis dan Estimasi Model Regresi Data Panel.....	69
4.2.1.	Analisis Deskriptif	69
4.2.2.	Hasil Pengujian Pemilihan Model	70
4.2.3.	Hasil Estimasi Model.....	72
4.2.4.	Hasil Uji Asumsi Klasik	74
4.3	Hasil Uji Hipotesis Statistik	80
4.3.1	Uji Hipotesis Parsial (Uji T).....	80
4.3.2	Uji Hipotesis Simultan (Uji F)	82
4.3.3	Determinasi (R-Squared)	82
4.4	Pembahasan.....	83
4.4.1.	Pengaruh Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Modal.....	83
4.4.2.	Pengaruh Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Modal.....	86
4.4.3.	Pengaruh Dana Bagi Hasil Terhadap Belanja Modal.....	88
4.4.4.	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Modal.....	90
4.4.5.	Pengaruh Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Modal.....	91
BAB V SIMPULAN DAN SARAN		93
5.1	Simpulan	93
5.2	Saran	93
DAFTAR PUSTAKA.....		95
LAMPIRAN		97

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Realisasi Belanja Modal di Kabupaten/Kota Provinsi Banten Tahun 2017 – 2021 (Ribuan Rupiah).....	8
Tabel 2.1 Kajian Empiris	33
Tabel 3.1 Operasional Variabel	48
Tabel 4.1 Hasil Uji Chow.....	71
Tabel 4.2 Hasil Uji Hausman	72
Tabel 4.3 Hasil Estimasi Regresi Panel Data	73
Tabel 4.4 Hasil Uji Multikolinearitas	77
Tabel 4.5 Hasil Uji Diferensiasi.....	77
Tabel 4.6 Hasil Uji Heteroskedastisitas	79
Tabel 4.7 Hasil Uji Autokorelasi.....	79
Tabel 4.8 Hasil Uji Statistik T	80
Tabel 4.9 Hasil Uji Statistik F	82

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Perbandingan PAD, Dana Perimbangan, dan Belanja Modal pada Provinsi Banten dan beberapa daerah di Jawa Barat tahun 2022 (Milyar Rupiah)	4
Gambar 1. 2 Realisasi Penerimaan Daerah Provinsi Banten Tahun 2019 – 2020 (Milyar Rupiah)	9
Gambar 1. 3 Persentase Realisasi Belanja Modal di Provinsi Banten	10
Gambar 1. 4 Grafik Perbandingan Belanja Daerah Provinsi Banten	11
Gambar 2. 1 Kerangka Pemikiran	39
Gambar 4. 1 Perkembangan belanja modal pada kabupaten/kota di provinsi Banten 2017-2022 (Milyar Rupiah)	63
Gambar 4. 2 Perkembangan Dana Alokasi Umum pada kabupaten/kota di provinsi Banten 2017-2022 (Milyar Rupiah)	65
Gambar 4. 3 Perkembangan Dana Alokasi Khusus pada kabupaten/kota di provinsi Banten 2017-2022 (Milyar Rupiah)	66
Gambar 4. 4 Perkembangan Dana Bagi Hasil pada kabupaten/kota di provinsi Banten 2017-2022 (Milyar Rupiah)	67
Gambar 4. 5 Perkembangan Dana Alokasi Khusus pada kabupaten/kota di provinsi Banten 2017-2022 (Milyar Rupiah)	68
Gambar 4. 6 Hasil Uji Normalitas	76

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum serta daya saing daerah merupakan tujuan dari otonomi daerah sejak ditetapkannya Undang-undang No. 23 Tahun 2014 yang berisi tentang Pemerintah Daerah memberikan otoritas sepenuhnya kepada setiap daerahnya baik provinsi maupun kabupaten/kota untuk mengatur dan mengurus kewenangan daerahnya untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan layanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan dan kekhasan serta dengan sedikit campur tangan pemerintah pusat.

Pada masa era desentralisasi fiskal ini, semakin banyak permintaan masyarakat akan pelayanan publik di daerahnya untuk lebih ditingkatkan lagi. Oleh karena itu, diharapkan adanya peningkatan fasilitas di berbagai sektor terutama pada sektor publik. Sebagaimana yang tercantum dalam anggaran daerah, Pemerintah Daerah memiliki kewenangan untuk mengalokasikan belanja daerah tersebut untuk peningkatan fasilitas publik dan sumber daya daerahnya. Selain untuk meningkatkan infrastruktur pembangunan suatu daerah, dapat juga meningkatkan daya tarik dan minat bagi investor untuk menanamkan investasinya di daerah yang nantinya akan memajukan pembangunan suatu daerah. (Dace Purba et al., 2021)

Untuk pengadaan aset suatu daerah, Pemerintah Daerah melakukan belanja modal sebagai investasi untuk membiayai pelaksanaan otonomi daerah yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan infrastruktur pembangunan serta sarana dan prasarana suatu daerah. Alokasi belanja modal tidak hanya untuk menambah fasilitas publik, juga dilakukan demi kelancaran aktivitas dan menunjang kegiatan pemerintah daerah tersebut.

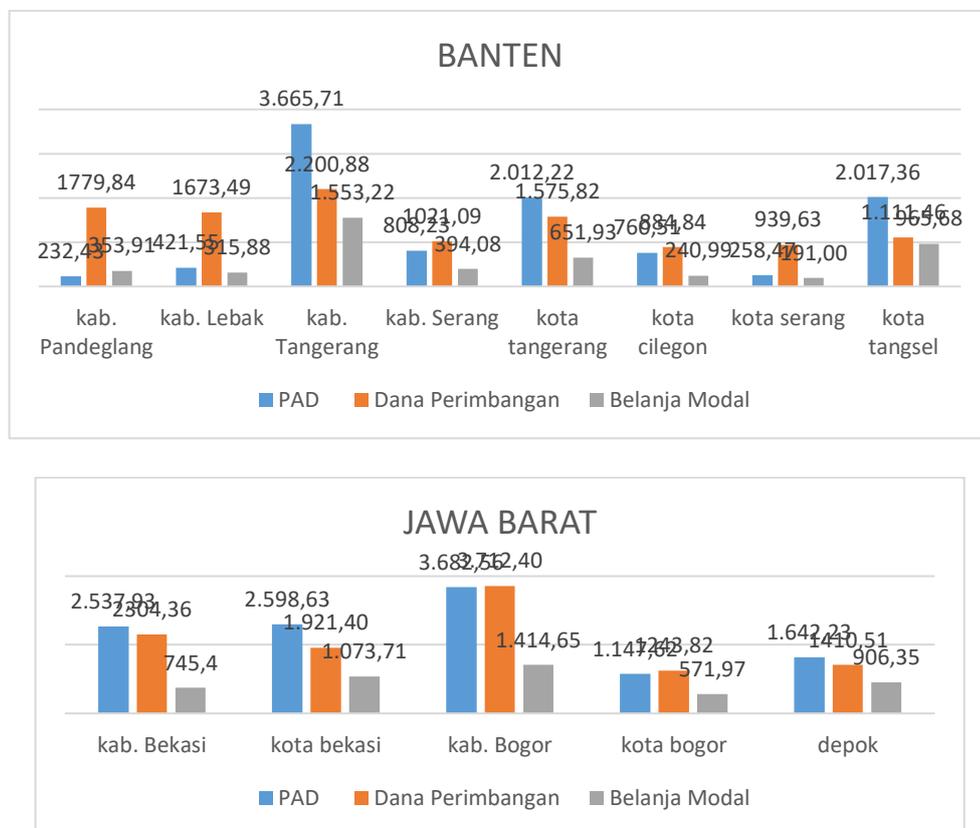
Dengan adanya kewenangan pemerintah daerah dalam meningkatkan infrastruktur pembangunan suatu daerah maka dibutuhkan anggaran daerah yang semakin besar untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah dalam pembangunan daerah maka diperlukannya sumber-sumber penerimaan daerah. Oleh karena itu, sumber pendapatan daerah berupa PAD dan dana perimbangan berpengaruh terhadap belanja daerah secara keseluruhan. Sumber utama dalam penerimaan untuk pembangunan suatu daerah berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang merupakan sumber kemandirian daerah itu sendiri. Sementara pada subsidi atau transfer daerah dari tingkat pemerintah pusat yang berupa dana perimbangan merupakan sumber penerimaan dana pendukung atau tambahan saja, maka besarnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi salah satu indikator penting dari kewenangan keuangan daerah (Roma & Sinaga, 2019).

Pada setiap daerah memiliki kapabilitas keuangan yang berbeda dalam mendanai aktivitas dan kegiatannya, hal ini dapat menyebabkan ketimpangan fiskal antar daerah. Oleh sebab itu, dalam mengatasi ketimpangan fiskal ini, pemerintah daerah perlu mengalokasikan dari APBN ini untuk mendukung kebutuhan daerahnya sebagai pelaksanaan desentralisasi. Dana tersebut disebut dana

perimbangan yang terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH). DAU merupakan dana yang pengalokasiannya mengutamakan aspek pemerataan wilayah dan keadilan yang selaras dengan pengelola urusan pemerintah (UU No. 32 pada tahun 2004). Dengan adanya transfer dana APBN dari pusat ini diharapkan kepada pemda untuk dapat lebih mengalokasikan PAD yang didapatkan untuk menganggarkan belanja modal di daerahnya. Dana perimbangan yang berikutnya yaitu Dana Alokasi Khusus. DAK adalah dana dari pemerintah pusat yang bersumber dari APBN yang pengalokasiannya untuk dana tertentu yang tujuannya membantu dengan mendanai kegiatan khusus pemerintah daerah yang sesuai dengan prioritas nasional (UU No. 33 Tahun 2004). Dana perimbangan yang terakhir yaitu Dana Bagi Hasil (DBH) yang mana dananya dialokasikan pada tiap daerah yang memperlihatkan (Roma & Sinaga, 2019).

Setiap daerah memiliki kemampuan keuangan yang tidak sama dalam mendanai kegiatan-kegiatannya, hal ini dapat menimbulkan ketimpangan fiskal antara satu daerah dengan daerah lainnya. Oleh karena itu, dalam mengatasi ketimpangan fiskal ini, pemerintah mengalokasikan dana yang bersumber dari APBN dalam mendanai kebutuhan daerah untuk pelaksanaan desentralisasi. Salah satu dana perimbangan dari pemerintah ini yaitu DAU dimana pengalokasiannya menekankan pada aspek pemerataan dan keadilan yang selaras dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan (UU No. 32 pada tahun 2004). Adanya transfer dana dari pusat ini diharapkan kepada pemerintah daerah untuk lebih mengalokasikan PAD yang didapatkan dalam membiayai belanja modal di

daerahnya. Dana transfer dari pemerintah pusat ke Pemerintah Daerah selain DAU yaitu DAK. Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan untuk daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional (UU No. 33 tahun 2004). Dana perimbangan selain DAU dan DAK yaitu DBH. Dana Bagi Hasil (DBH) merupakan dana yang dialokasikan pada tiap-tiap daerah dengan memperlihatkan potensi daerah penghasil berdasarkan angka presentase untuk mendanai kebutuhan daerahnya sendiri dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.



Sumber: Portal Data DJPK (data diolah)

Gambar 1. 1 Perbandingan PAD, Dana Perimbangan, dan Belanja Modal pada Provinsi Banten dan beberapa daerah di Jawa Barat tahun 2022 (Milyar Rupiah)

Berdasarkan pada gambar 1.1 yaitu merupakan perbandingan nilai Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Belanja Modal antara Kabupaten dan Kota di Provinsi Banten dan beberapa Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Barat. Secara letak geografis, Provinsi Banten adalah Provinsi yang berdekatan dengan DKI Jakarta yang sebelumnya merupakan Ibu Kota NKRI. Berada di ujung bagian barat Pulau Jawa, Provinsi Banten memiliki posisi strategis dari segi jalur perdagangan dan wilayah penduduk ibu kota. Dikomparasikan dengan beberapa daerah di Provinsi Jawa Barat yang berbatasan langsung dengan DKI Jakarta yaitu sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten dan Kota Bekasi, sebelah Selatan dengan Kabupaten dan Kota Bogor serta Depok.

Sebagai daerah yang letaknya berdekatan dengan ibu kota seharusnya menjadi keuntungan dalam meningkatkan perekonomian dan infrastruktur di daerah tersebut. Banten juga menjadi penghubung utama jalur perdagangan Sumatera-Jawa yang menjadikan Banten sebagai lokasi aglomerasi perekonomian. Namun jika dilihat dari kondisinya Provinsi Banten sangat tertinggal dari infrastruktur daerahnya. Bahkan terdapat artikel yang ditulis oleh Agnes Z. Yonatan pada November 2023 berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik, 3 Daerah di Provinsi Banten menempati posisi teratas yang menyatakan wilayah dengan harapan hidup terendah di Pulau Jawa.

Jika dilihat perbandingan gambar diatas, pada beberapa daerah di Provinsi Jawa Barat gambaran fluktuasinya lebih seimbang dibanding Provinsi Banten. Dapat diketahui bahwa dana perimbangan yang disalurkan pemerintah pusat sebanding dengan PAD yang didapatkan di daerahnya. Berbeda dengan Provinsi

Banten yang mana terjadi ketimpangan jika dilihat dari PAD, Dana Perimbangan dan Belanja Modalnya.

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Banten tahun 2017 - 2022 memiliki visi dan misi yang dimana tercantum visi yang berbunyi “*Banten Mandiri, Maju, Sejahtera*” adalah merupakan refleksi dari terwujudnya Provinsi Banten sebagai salah satu provinsi termaju di Indonesia. Cita-cita tersebut tergambar dalam kemajuan pembangunan dan kesejahteraan Provinsi Banten dalam segala bidang. Oleh karena itu, untuk mewujudkan Visi Provinsi Banten 2017-2022 tersebut akan ditempuh melalui lima misi pembangunan daerah sebagai berikut :

1. Menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*)
2. Membangun dan meningkatkan kualitas infrastruktur;
3. Meningkatkan akses dan pemerataan pelayanan Pendidikan berkualitas;
4. Meningkatkan akses dan pemerataan pelayanan Kesehatan berkualitas;
5. Meningkatkan kualitas pertumbuhan dan pemerataan ekonomi.

Dengan misi diatas terdapat beberapa prioritas unggulan serta rincian program rencana pembangunan. Pada prioritas pertama yaitu meningkatkan serta membangun kualitas infrastruktur. Untuk pembangunan jalan Provinsi yang rusak akan diperbarui pembangunan 273.000 meter dari total 852.000 meter jalan provinsi. Lalu jalan Kolektor Baru yang dimana jalan tersebut untuk membuka jalur isolasi dan berfungsi sebagai interkoneksi antar wilayah. Adapula rencana pembangunan jembatan dengan memperbaiki jembatan di seluruh jalan Provinsi dan jembatan penyebrangan sebagai fasilitas pelayanan publik untuk

mempermudah akses penduduk serta menunjang kegiatan ekonomi masyarakat. Adapula misi untuk menormalisasikan 32 sungai dan 41 situ serta merevitalisasi Bendungan dan Irigasi yang ada di seluruh Banten untuk mengembalikan fungsinya salah satunya yaitu upaya untuk menyelesaikan persoalan banjir. Untuk rencana pembangunan dan pengembangan sistem sarana transportasi massal skala provinsi akan ada pembangunan terminal tipe B dan infrastruktur transportasi laut untuk aktivitas ekonomi sektor maritim. Pada sektor pariwisata adanya rencana untuk merevitalisasi Kawasan Banten Lama serta pelestarian cagar budaya dan kearifan lokal. Pada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi diperlukan evaluasi untuk perencanaan pemanfaatannya serta penataan Kawasan Kumuh Kampung Nelayan, dan Perdesaan/Perkotaan. Dan Pengendalian Dampak Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Sampah Skala Provinsi untuk pembangunan daya dukung lingkungan yang perlu dipertahankan.

Lalu ada prioritas berikutnya yaitu pada bidang Pendidikan dimana perlu untuk meningkatkan akses dan pemerataan Pendidikan yang berkualitas serta membentuk siswa yang berakhlaqul karimah dengan cara menanamkan nilai-nilai agama dalam fungsi sekolah. Untuk merealisasikan misi itu dibuatlah rencana pembangunan sebanyak 2.016 Ruang Kelas Baru atau 168 Unit Sekolah untuk jenjang SMA dan SMK untuk meningkatkan APK dari 66 ke 80 yang biayanya setara dengan 705 Miliar. Pada tenaga pendidik pun diperlukan peningkatan kompetensi guru yang berpendidikan Strata 1 bagi 343 Guru SMA dan 820 Guru SMK, Strata 2 bagi 500 Guru SMA dan SMK. Namun, dengan seiring peningkatan

kompetensi guru, diperlukan pula meningkatkan Kesejahteraan Guru melalui pemberian insentif bagi Guru SMA dan SMK.

Pada prioritas unggulan berikutnya yaitu dibidang Kesehatan dinyatakan bahwa diperlukan peningkatan akses dan pemerataan pelayanan Kesehatan yang berkualitas dengan meningkatkan kapasitas regulasi dibidang pelayanan kesehatan. Maka diadakan usulan mengembangkan Rumah Sakit Umum Provinsi menjadi Rumah Sakit Rujukan Regional. Lalu penyediaan Dokter pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan Khususnya untuk wilayah Terpencil dengan Pemberian Insentif bagi 440 Dokter Umum/Gigi dan Petugas Kesehatan Masyarakat. Serta Penyediaan Air Bersih kepada masyarakat melalui Pembangunan 8 Sumber Air Baku di 8 Kabupaten/Kota.

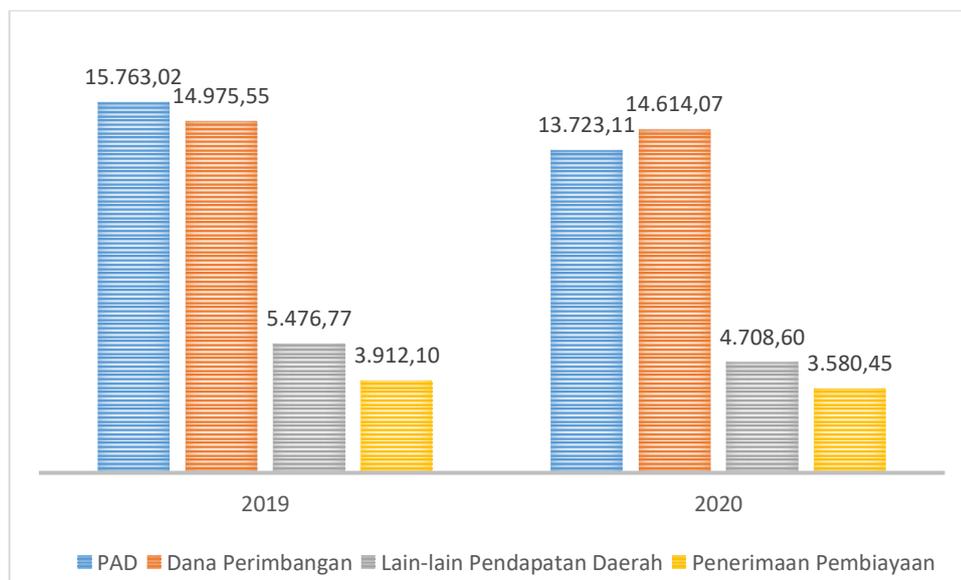
Tabel 1. 1 Realisasi Belanja Modal di Kabupaten/Kota Provinsi Banten Tahun 2017 – 2022 (Milyar Rupiah)

No	Kabupaten/kota	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Kab. Pandeglang	541.39	343.01	361.84	224.20	333.55	353.91
2	Kab. Lebak	374.00	313.77	384.61	228.26	281.85	315.87
3	Kab. Tangerang	1,530.66	1,763.56	1,392.37	976.51	1,245.79	1,553.22
4	Kab. Serang	463.75	589.72	600.92	371.99	401.56	394.08
5	Kota Tangerang	1,013.68	1,024.75	880.36	278.62	555.02	651.93
6	Kota Cilegon	500.71	304.64	413.22	201.31	202.11	240.99
7	Kota Serang	333.51	431.08	252.84	178.52	245.66	191.00
8	Kota Tangsel	1,007.51	1,019.93	1,206.42	732.90	748.79	965.68

Sumber: Statistik Keuangan Daerah Provinsi Banten

Dari tahun 2017 hingga tahun 2022, realisasi belanja modal cenderung semakin menurun di setiap daerahnya. Padahal Provinsi Banten merupakan salah satu Provinsi yang memiliki potensi yang cukup besar dalam PAD dan Dana Perimbangan-nya. Salah satu potensi PAD Provinsi Banten adalah dari sumber daya alam yang melimpah seperti sektor pariwisata yang berada di Kabupaten

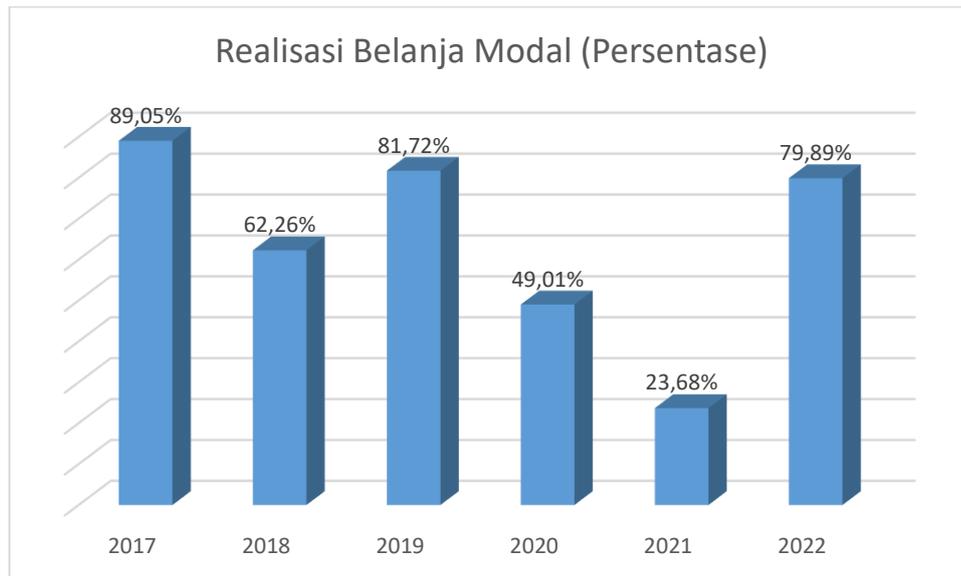
Pandeglang, Kabupaten Serang (anyer), Kabupaten Lebak, lalu sektor perikanan karena 75% Banten dikelilingi oleh laut, lalu sektor pertanian pada setiap kota dan kabupatennya, serta sektor industry di Cilegon yang dikenal sebagai kota penghasil baja terbesar di Asia Tenggara merupakan keunggulan kompetitif. Selain itu, letak dan kondisi geografisnya yang berdekatan dengan ibukota negara yaitu DKI Jakarta.



Sumber: Statistik Keuangan Daerah Provinsi Banten 2020

Gambar 1. 2 Realisasi Penerimaan Daerah Provinsi Banten Tahun 2019 – 2020 (Milyar Rupiah)

Dalam rancangan RKPD 2019 dengan tema prioritas pembangunan yang disampaikan oleh Kepala Bappeda Provinsi Banten pada acara Musrenbang RKPD tahun 2019 di Kabupaten Lebak, disebutkan tujuan RKP Nasional yaitu pemerataan pembangunan untuk pertumbuhan berkualitas. Hal tersebut menjadi acuan rencana kerja pemerintah Provinsi banten yaitu dapat menguranginya kesenjangan wilayah melalui pembangunan dan peningkatan infrastuktur daerah untuk percepatan pertumbuhan ekonomi.



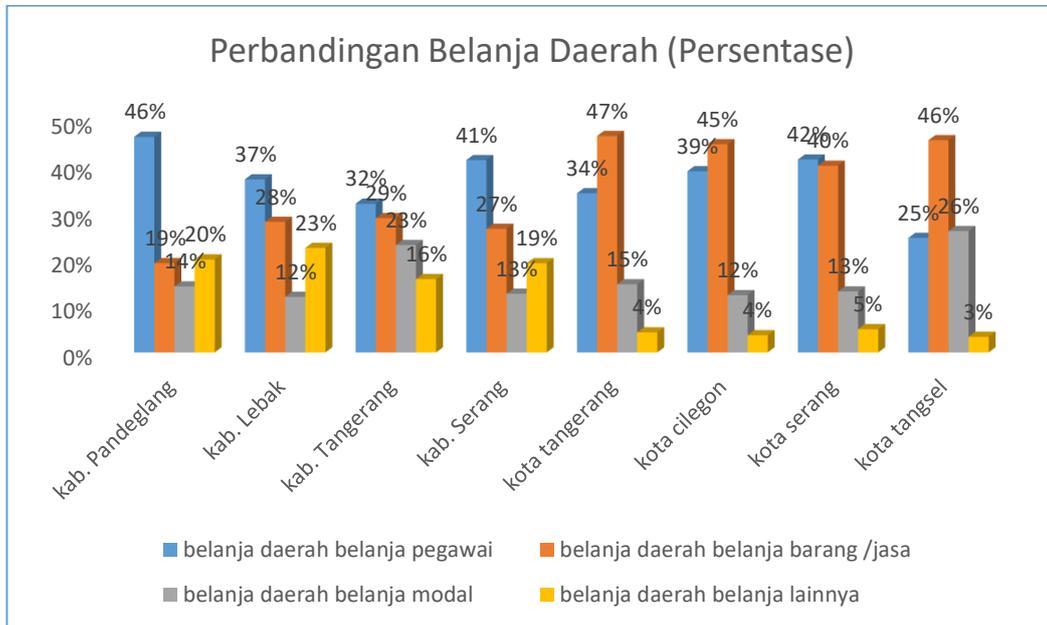
Sumber : DJPK Portal Data APBD

Gambar 1. 3 Persentase Realisasi Belanja Modal di Provinsi Banten

Dapat dilihat pada gambar 1.2 menunjukkan persentase realisasi belanja modal di Provinsi Banten. Dapat diketahui persentase pemanfaatan belanja modal secara realisasi dengan belanja modal yang dianggarkan. Semakin besar persentase maka pemerintah pada umumnya telah memanfaatkan APBD khususnya belanja modal dengan baik. Berdasarkan data diatas bahwa realisasi belanja modal Provinsi Banten, masih belum maksimal memanfaatkan anggaran yang sudah ditetapkan pemerintah daerah. Terutama yang terjadi pada tahun 2020 dan 2021 yang persentase realisasinya tidak mencapai 50% dari anggarannya. Hal tersebut salah satu dampak dari pandemic Covid 19 yang membuat pembangunan daerah kurang produktif.

Dalam upaya untuk meningkatkan kontribusi publik terhadap penerimaan daerah, alokasi belanja modal hendaknya lebih ditingkatkan. Belanja modal yang dilakukan oleh pemerintah daerah diantaranya pembangunan dan perbaikan sektor

pendidikan, kesehatan, jalan, dan transportasi yang layak sehingga masyarakat juga menikmati manfaat dari pembangunan daerah.



Sumber : DJPK 2022 (data diolah)

Gambar 1. 4 Grafik Perbandingan Belanja Daerah Provinsi Banten

Berdasarkan data pada gambar 1.3, dapat dilihat bahwa belanja daerah pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Banten pada tahun 2022 lebih banyak digunakan untuk belanja pegawai dan belanja barang jasa dibandingkan belanja modal. Oleh karena itu, dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik, pemerintah daerah seharusnya mengubah komposisi belanjanya. Selama ini belanja daerah lebih banyak digunakan untuk belanja rutin yang relatif kurang produktif. Pemanfaatan belanja hendaknya dialokasikan untuk hal-hal yang lebih produktif, misal untuk melakukan aktivitas pembangunan, dengan kata lain belanja modal dilakukan dalam rangka pembentukan modal yang sifatnya menambah aset tetap/inventaris.

Berdasarkan hal tersebut, sehingga diperlukan anggaran belanja modal yang cukup besar untuk mencapai keberhasilan pembangunan Provinsi Banten. Potensi dana penerimaan daerahnya pun Banten pun cukup menjanjikan jika dilihat dari sektor unggulannya pada setiap kota dan kabupatennya. Oleh karena itu, saya tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul : “Pengaruh Dana Perimbangan dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Modal pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Banten.” Dengan melihat pengaruh peningkatan pada DAU, DAK, DBH, dan PAD sebagai pendapatan daerah yang diketahui mampu meningkatkan alokasi maupun realisasi terhadap belanja modal.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang, maka didapatkan rumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap belanja modal Provinsi Banten pada tahun 2017 – 2022?
2. Bagaimana pengaruh Dana Alokasi Khusus terhadap belanja modal Provinsi Banten pada tahun 2017 – 2022?
3. Bagaimana pengaruh Dana Bagi Hasil terhadap belanja modal Provinsi Banten pada tahun 2017 – 2022?
4. Bagaimana pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap belanja modal Provinsi Banten pada tahun 2017 – 2022?
5. Bagaimana pengaruh DAU, DAK, DBH & PAD secara simultan terhadap belanja modal Provinsi Banten pada tahun 2017 – 2022?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap belanja modal Provinsi Banten pada tahun 2017 – 2022
2. Untuk mengetahui pengaruh Dana Alokasi Khusus terhadap belanja modal Provinsi Banten pada tahun 2017 – 2022
3. Untuk mengetahui pengaruh Dana Bagi Hasil terhadap belanja modal Provinsi Banten pada tahun 2017 – 2022
4. Untuk mengetahui pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap belanja modal Provinsi Banten pada tahun 2017 – 2022
5. Untuk mengetahui pengaruh DAU, DAK, DBH & PAD secara simultan terhadap belanja modal Provinsi Banten pada tahun 2017 – 2022

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat bagi pemerintah daerah, hasil penelitian ini sebagai alternatif masukan atau saran untuk meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan pemerintah daerah secara efektif dan efisien dalam pemanfaatannya agar tercapainya keberhasilan yang ingin tercapai dalam pelaksanaan pembangunan daerah.
2. Manfaat bagi peneliti selanjutnya, hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi menambah pengetahuan serta acuan dalam penelitian selanjutnya untuk dibidang yang sama seperti penelitian ini.

3. Manfaat bagi saya sebagai peneliti, penelitian ini bermanfaat sebagai media untuk belajar memecahkan masalah secara ilmiah dan dari penelitian ini dapat mengetahui pengaruh dari Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil dan Pendapatan Asli Daerah terhadap belanja modal serta penerapan teorinya untuk menganalisis kinerja Perekonomian Pemerintah Daerah dalam mengelola keuangan daerahnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Anjani. (2014). *Hubungan PAD, Belanja Modal dan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah di Nusa Tenggara Barat*. 11. <https://doi.org/https://doi.org/10.21107/infestasi.v11i1.1121.g953>
- Atas, P., Menteri, P., Negeri, D., & Tahun, N. (2007). *Menteri dalam negeri republik indonesia*. 1–13.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Banten. (2018 - 2021). *Statistik Keuangan Daerah Provinsi Banten*.
- Badrudin, R. (2012). *Ekonomika Otonomi Daerah*. UPP STIM YKPN.
- BPK. (2006). *Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*. 1–73. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/126455/permendagri-no-13-tahun-2006>
- Dace Purba, Damanik, D., & Purba, E. (2021). Faktor - Faktor Yang Mempengaruhi Belanja Modal Di Kabupaten Simalungun. *Jurnal Ekuilnomi*, 3(2), 115–126. <https://doi.org/10.36985/ekuilnomi.v3i2.262>
- Eksandy, A., Hakim, M. Z., & Ekawati. (2019). *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Modal (Pada Pemerintah Provinsi Banten Periode 2011-2015)*. 2009, 85–94.
- Gujarati, & Porter. (2012). *Dasar-Dasar Ekonometrika Edisi Kelima*. Jakarta: Salemba Empat.
- Herawati, I. D., & Lestari, N. (2022). Determinan Belanja Modal Pada Kabupaten Dan Kota Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal Akuntansi, Ekonomi Dan ...*, 2(1), 24–30. <https://journal.amikveteran.ac.id/index.php/jaem/article/view/72%0A>
- Ishak, J. F., Sari, Y. P., Dwitayanti, Y., & Mauluddi, H. A. (2021). The Determinants Factors of Capital Expenditure. *Ilomata International Journal of Tax and Accounting*, 2(2), 158–165. <https://doi.org/10.52728/ijtc.v2i2.224>
- Jumiati, E., Indriani, M., & Darwanis, D. (2019). The Influence of Regional Revenue, Balancing Funds, Special Autonomic Funds, and Economic Growth on Capital Expenditures Allocation. *Journal of Accounting Research, Organization and Economics*, 2(2), 90–96. <https://doi.org/10.24815/jaroe.v2i2.14317>
- Kuncoro, M. (2014). *Otonomi Daerah: Menuju Era Baru Pembangunan Daerah*. Erlangga.
- Mulyani, H. (2016). *The Relationship of Local Own Revenues and General Fund Allocation on Capital Expenditure of Local Government*. 163–166.

<https://doi.org/10.2991/gcbme-16.2016.29>

- Pangaribuan, L. dkk. (2018). *Determinan Belanja Modal pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatra Selatan*. 143–149.
- Patasik, C. (2021). *Pengaruh Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Pengalokasian Belanja Modal (Studi pada Pemerintah Daerah di Sulawesi Selatan)*. 12, 1–61.
- Rahma, D. N., & Riharjo, I. B. (2019). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Bagi Hasil Terhadap Belanja Modal Kabupaten Pacitan. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 8.
- Raviyanti, A. A., Rahayu, S., & Mahardika, D. P. K. (2017). Pengaruh pad, dau, dak terhadap ipm dengan belanja modal sebagai variabel intervening (studi pada kabupaten/kota di provinsi papua tahun 2009 -2013). *Jurnal Ekonomi*, 22(2), 243–256. <https://doi.org/10.24912/je.v22i2.224>
- Rochmatullah, M. R., Hartanto, R., & Arifin, A. (2016). Determinating The Value of Capital Expenditure Allocation in Indonesia Local Government. *Jurnal Ekonomi Pembangunan: Kajian Masalah Ekonomi Dan Pembangunan*, 17(2), 152. <https://doi.org/10.23917/jep.v17i2.2082>
- Roma, S., & Sinaga, U. L. I. (2019). *Pengaruh faktor-faktor anggaran pemerintah terhadap pengalokasian belanja modal provinsi sumatera utara tahun 2016-2019*.
- Sudika, I. K., & Budiarta, K. I. (2017). "PENGARUH PAJAK DAERAH, RETRIBUSI DAERAH, DANA ALOKASI UMUM DAN DANA ALOKASI KHUSUS PADA BELANJA MODAL PROVINSI BALI Fakultas Ekonomi dan Bisnis , Universitas Udayana (Unud), Bali , Indonesia Fakultas Ekonomi dan Bisnis , Universitas Udayana (Unud), B. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 21(2), 1–30.
- Winarno, W. W. (2017). *Analisis Ekonometrika dan Statistika dengan Eviews*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.